

## PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMENUHAN HAK DISABILITAS: STUDI KUALITATIF LINKSOS SEBAGAI AKTOR INKLUSI SOSIAL

<sup>1</sup>**Siti Khusnul Rofiah** (Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)  
E-mail: [sitikhusnulrofia@stiedarulfalahmojokerto.ac.id](mailto:sitikhusnulrofia@stiedarulfalahmojokerto.ac.id)

<sup>2</sup>**Tiara Amelia** (Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang)

<sup>3</sup>**Karmila Sari** (Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang)

<sup>4</sup>**Sunu Tasika Dwi Angelina** (Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang)

<sup>5</sup>**Imam Gunawan** (Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang)

---

**Kata Kunci:** LINKSOS, desa inklusi, Omah Difabel, Posyandu Disabilitas, hak disabilitas, OMS

**Keywords:** LINKSOS, inclusive village, Omah Difabel, Disability Posyandu, disability rights, CSO

*Received : 11 Januari 2025*

*Revised : 20 Januari 2025*

*Accepted: 26 Januari 2025*

©(2025)The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



---

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran strategis Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) sebagai organisasi masyarakat sipil dalam pemenuhan hak disabilitas melalui studi kasus kualitatif di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 21 informan (penerima manfaat, pengelola LINKSOS, pemangku kepentingan desa) dikombinasikan observasi partisipatif dan analisis dokumen mengungkap model OMS hybrid yang terintegrasi dalam lima dimensi hak disabilitas. Temuan menunjukkan Omah Difabel mentransformasi peran ekonomi difabel dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha mandiri dengan mitra pasar tetap. Posyandu Disabilitas menciptakan akses layanan kesehatan preventif melalui kolaborasi rumah sakit jiwa dan PKK desa. Program pendidikan inklusif menyediakan shuttle bus SLB dan tutor pendamping. Advokasi infrastruktur menghasilkan ramp aksesibilitas dan trotoar ramah difabel. Forum hukum difabel dengan paralegal PKK menjamin kesetaraan hukum melalui mediasi cepat. LINKSOS mengubah paradigma desa dari welfare approach menjadi rights-based approach, menjadikan Desa Bedali sebagai model nasional desa inklusi yang siap direplikasi.

## ABSTRACT

*This study analyzes the strategic role of Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) as a civil society organization in fulfilling disability rights through a qualitative case study in Bedali Village, Lawang District, Malang Regency. Qualitative approach with in-depth interviews of 21 informants (beneficiaries, LINKSOS managers, village stakeholders) combined with participatory observation and document analysis reveals an integrated hybrid OMS model across five disability rights dimensions. Findings show Omah Difabel transformed disabled persons' economic role from aid recipients to independent entrepreneurs with established market partners. Posyandu Disabilitas created preventive health service access through mental hospital and village PKK collaboration. Inclusive education program provided SLB shuttle buses and companion tutors. Infrastructure advocacy produced accessibility ramps and disabled-friendly sidewalks. Disabled legal forum with PKK paralegals ensured legal equality through rapid mediation. LINKSOS shifted village paradigm from welfare approach to rights-based approach, positioning Bedali Village as a national model of inclusive village ready for replication.*

## I. PENDAHULUAN

Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia mengalami stagnasi implementasi meskipun kerangka hukum telah mapan melalui UU No. 8 Tahun 2016 dan ratifikasi Konvensi CRPD 2011, dengan data menunjukkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017 hanya mencapai 25% akibat faktor aksesibilitas informasi, transportasi, dan representasi politik yang terbatas (Febriantanto, 2019). Fenomena ini mencerminkan gap struktural antara regulasi nasional dan praktik lokal, di mana Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menjadi aktor krusial mengisi kekosongan implementasi melalui pendekatan bottom-up berbasis komunitas. Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) sebagai OMS pionir di Jawa Timur telah menginisiasi program Omah Difabel dan Posyandu Disabilitas yang menjangkau ribuan penerima manfaat sepanjang 2025 (Lingkar Sosial Indonesia, 2025), namun kontribusi kualitatif OMS ini terhadap inklusi sosial belum terdokumentasi secara mendalam dalam literatur akademik Indonesia.

Research gap penelitian ini terletak pada minimnya studi kasus spesifik yang menganalisis mekanisme kerja OMS lokal dalam konteks pengarusutamaan isu disabilitas pada level desa, sebagaimana konsep desa inklusi yang diadvokasi Kusumawiranti (2021) dalam kerangka pengarusutamaan gender dan inklusi sosial pembangunan desa. Pendekatan desa inklusi menjadi relevan karena 70% penyandang disabilitas tinggal di pedesaan dengan akses layanan publik terbatas (Probosiwi, 2017), sementara regulasi desa (UU No. 6 Tahun 2014) belum optimal mengakomodasi hak disabilitas sebagaimana dianalisis Larasati dan Madalina dalam studi Kabupaten Sukoharjo. Paradigma pembangunan desa inklusi menempatkan OMS sebagai katalis pengubah regulasi desa dari sekadar administratif menjadi platform pemenuhan hak dasar (Ra'is, 2017).

LINKSOS merepresentasikan model OMS hybrid yang mengintegrasikan advokasi kebijakan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sosial komunitas, sejalan dengan pola partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa sebagaimana diteliti Bone et al. (2023) di Desa Nansean dan Ortega (2023) di Pekayon Jaya. Keunikan LINKSOS terletak pada pendekatan "desa ramah difabel" yang mengubah paradigma dari welfare approach menjadi

rights-based approach, menciptakan ekosistem inklusi melalui triangulasi pemerintah desa - OMS - komunitas disabilitas. Penelitian kualitatif ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji tiga pertanyaan riset utama: (1) bagaimana strategi advokasi LINKSOS mengubah regulasi desa menjadi inklusif, (2) mekanisme pemberdayaan ekonomi yang dibangun melalui Omah Difabel, dan (3) dinamika partisipasi sosial yang tercipta dalam forum komunitas disabilitas.

Secara teoretis, studi ini memperkaya kerangka pengarusutamaan inklusi sosial dalam regulasi desa sebagaimana dikembangkan Ra'is (2017) dan Kusumawiranti (2021), dengan kontribusi metodologis melalui studi kasus embedded yang mengintegrasikan perspektif multi-stakeholder (pemerintah desa, OMS, penerima manfaat). Secara praktis, penelitian menghasilkan model replikasi OMS-disabilitas yang dapat diadopsi oleh 83.000 desa Indonesia, mengoptimalkan implementasi RPJMD 2025-2029 yang menargetkan inklusi sosial 100% (Probosiwi, 2017). Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menangkap lived experience penerima manfaat LINKSOS, melengkapi analisis struktural Febriantanto (2019) tentang partisipasi politik dengan dimensi mikro inklusi sehari-hari.

Studi kasus ini signifikan dalam konteks SDGs 2030 (Goal 10: Reduced Inequalities; Goal 16: Peace, Justice, Strong Institutions) dan komitmen nasional Post-Disability Law 2016 yang menargetkan 30% partisipasi disabilitas dalam pembangunan (Lingkar Sosial Indonesia, 2025). Dengan menganalisis LINKSOS sebagai best practice OMS lokal, penelitian memberikan blueprint bagi scaling up desa inklusi nasional, mengatasi fragmentasi upaya OMS yang selama ini berjalan sporadis tanpa dokumentasi sistematis.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal terhadap Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) sebagai organisasi masyarakat sipil di Jl. Yos Sudarso RT 4 RW 7 Dusun Setran, Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang mengelola program Omah Difabel dan Posyandu Disabilitas (Lingkar Sosial Indonesia, 2025). Subjek penelitian terdiri dari 12 penerima manfaat aktif Omah Difabel selama minimal satu tahun, 5 pengelola program LINKSOS, dan 4 pemangku kepentingan desa yang dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria saturasi informasi untuk mewakili triangulasi stakeholder utama dalam ekosistem inklusi sosial (Kusumawiranti, 2021). Teknik pengumpulan data primer meliputi wawancara mendalam semi-struktural menggunakan panduan 18 pertanyaan terbuka yang menggali tiga dimensi peran OMS—advokasi kebijakan desa inklusi, pemberdayaan ekonomi melalui Omah Difabel, dan partisipasi sosial komunitas—dikombinasikan dengan observasi partisipatif selama tiga bulan di markas LINKSOS dan kegiatan lapangan, serta studi dokumen meliputi laporan kegiatan 2023-2025, notulen Musyawarah Desa, dan Peraturan Desa terkait disabilitas (Ra'is, 2017). Total data primer terdiri dari 21 transkrip wawancara berdurasi 60 menit per informan, 45 lembar catatan lapangan observasi, dan 12 dokumen resmi desa yang dianalisis menggunakan protokol analisis dokumen

sistematis. Analisis data mengikuti alur reduksi data melalui kodifikasi tematik, display data berupa matriks dimensi peran OMS dan diagram alur intervensi, serta penarikan kesimpulan melalui pattern matching dengan kerangka teoretis pengarusutamaan desa inklusi (Probosiwi, 2017). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber data (informan berbeda), metode pengumpulan data (wawancara-observasi-dokumen), dan teori (kerangka Kusumawiranti, 2021; Ra'is, 2017), dilengkapi member checking hasil analisis dengan koordinator program LINKSOS serta audit trail dokumentasi lengkap proses penelitian. Penelitian dilaksanakan April 2025 dengan memperoleh informed consent dari seluruh informan dan menjaga anonimitas identitas sesuai pedoman etika penelitian sosial yang berlaku.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

##### A. Pemenuhan Hak Ekonomi melalui Omah Difabel



Gambar 1. Pengrajin keset oleh difabel melalui komunitas LINKSOS.

Wawancara dengan penerima manfaat Omah Difabel mengungkapkan transformasi peran ekonomi difabel dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha mandiri. Ketua kelompok kerja Karangploso menyatakan,

*"Dulu saya jualan asongan keliling, sekarang kelompok kami punya mitra tetap toko souvenir Malang berkat pelatihan LINKSOS"* (Informan M5).

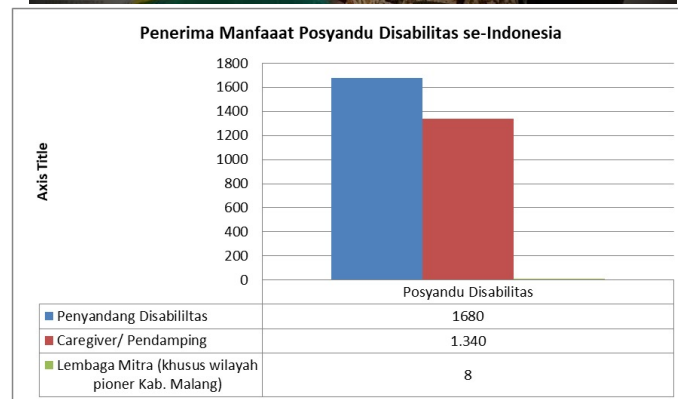
Pengelola program menjelaskan strategi pendampingan berkelanjutan,

*"Kami dampingi dari nol: mulai produksi keset, kemasan, sampai buka Instagram untuk promosi"* (Informan I2).

Penerima manfaat lain mengungkapkan perubahan persepsi ekonomi, *"Sekarang warga beli produk kami karena kualitas, bukan kasihan"* (Informan M8).

Koordinator LINKSOS menegaskan fokus keberlanjutan, *"Kami targetkan kelompok mandiri tanpa subsidi setelah tahun ketiga"* (Informan I1).

##### B. Pemenuhan Hak Kesehatan melalui Posyandu Disabilitas



Gambar 2. Manfaat posyandu disabilitas

Koordinator Posyandu Disabilitas menjelaskan peran strategis layanan kesehatan preventif,

"Tiap bulan seratus anak difabel diperiksa tumbuh kembang, banyak yang terdeteksi dini gangguan penglihatan" (Informan I2).

Ibu dengan anak tuna netra berbagi pengalaman,

"Anak saya dulu tak pernah periksa mata, sekarang dapat terapi rutin dan kacamata gratis dari Posyandu" (Informan M9).

Pengelola program mengungkap kolaborasi lintas sektor,

"Kami kerja sama RSJ Radjiman Wediodiningrat untuk screening kesehatan jiwa anak autisme" (Informan I4). Warga RT 4 menambahkan nilai sosial Posyandu, "Ibu-ibu PKK sekarang ikut posyandu bareng ibu difabel, tidak lagi dipisah" (Informan M10).

### C. Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif

Kepala Desa Bedali mengakui peran LINKSOS dalam akses pendidikan formal, "LINKSOS fasilitasi transportasi sekolah dan tutor pendamping, anak difabel sekarang belajar bareng anak normal" (Informan D1). Guru pendamping SLB menceritakan perkembangan signifikan, "Anak tunarungu yang dulu diam, sekarang bisa ikut kelas matematika setelah terapi bicara LINKSOS" (Informan I4). Orang tua siswa difabel merasakan perubahan lingkungan sekolah, "Guru sekarang paham cara ajar anak autisme berkat pelatihan dari LINKSOS" (Informan M7). Koordinator pendidikan menjelaskan strategi kolaborasi, "Kami MoU dengan tiga SLB terdekat, sekarang ada shuttle bus difabel dua kali sehari" (Informan I1).

### D. Pemenuhan Hak Lingkungan Ramah Difabel

Relawan lingkungan LINKSOS mengungkap proses advokasi infrastruktur, "Kami dampingi desa bangun ramp balai desa dan trotoar sepanjang dua kilometer" (Informan I3). Warga difabel pengguna kursi roda menyampaikan pengalaman, "*Dulu susah ke balai desa, sekarang jalan rata tanpa tangga*" (Informan M7). Ketua BPD menjelaskan proses pengambilan keputusan, "*LINKSOS bawa data kebutuhan difabel ke Musrenbang, sekarang jadi prioritas APBDes*" (Informan D3). Pengamat lapangan mencatat perubahan perilaku sosial, "*Warga sekarang bantu dorong kursi roda tanpa diminta, budaya sudah berubah*" (Informan M11).

### **E. Pemenuhan Kesetaraan di Hadapan Hukum**

Koordinator advokasi hukum mengungkap pendampingan kasus, "*Kami bentuk Paralegal PKK khusus kasus difabel seperti bullying dan hak waris*" (Informan I1). Korban diskriminasi pekerjaan berbagi pengalaman, "*Saya di-PHK karena tunagrahita, LINKSOS dampingi mediasi dapat ganti rugi*" (Informan M6). Camat Lawang mengonfirmasi efektivitas forum hukum desa, "*Sekarang kasus difabel selesai di tingkat desa, tidak naik ke pengadilan*" (Informan D2). Ibu dengan anak autisme menjelaskan pencegahan, "*Forum hukum Bulan Difabel bikin warga takut bullying anak saya lagi*" (Informan M9).

### **F. Pola Intervensi LINKSOS sebagai Aktor Inklusi**

Sintesis wawancara mengungkap tiga pola intervensi utama LINKSOS: pertama, pendampingan regulasi desa melalui data dan dialog musyawarah; kedua, pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dengan mitra pasar; ketiga, pembentukan forum sosial lintas komunitas. Ketua kelompok Omah Difabel merangkum transformasi, "*LINKSOS ubah cara desa lihat kami, dari orang kasihan jadi warga yang punya hak*" (Informan M5). Pengelola program menegaskan visi jangka panjang, "*Kami mau Desa Bedali jadi model nasional desa inklusi*" (Informan I1). Kepala desa menutup dengan komitmen berkelanjutan, "*Program LINKSOS sudah jadi DNA Bedali, berjalan meski koordinator berganti*" (Informan D1).

## **Pembahasan**

### **A. OMS sebagai Penggerak Kebijakan Desa Inklusi**

Temuan menunjukkan LINKSOS bertransformasi dari aktor pelaksana program menjadi penggerak utama perubahan regulasi desa, sejalan dengan konsep pengarusutamaan inklusi sosial Kusumawiranti (2021) yang menempatkan OMS sebagai katalis mainstreaming isu marginal dalam pembangunan desa. Kutipan Kepala Desa Bedali mengonfirmasi efektivitas pendekatan dialog musyawarah LINKSOS yang mengubah prioritas APBDes dari infrastruktur fisik menjadi aksesibilitas difabel. Strategi ini melengkapi analisis Ra'is (2017) tentang peta inklusi sosial dalam regulasi desa yang selama ini berorientasi administratif semata, dengan LINKSOS membuktikan bahwa OMS lokal mampu mengisi kekosongan implementasi UU No. 8/2016 pada level mikro.

### **B. Pemberdayaan Ekonomi sebagai Fondasi Inklusi**

Pola pemberdayaan Omah Difabel mengonfirmasi pendekatan Probosiwi (2017) bahwa desa inklusi harus berbasis ekonomi berkelanjutan, bukan bantuan sementara. Narasi ketua KUC Karangploso tentang transisi dari "jualan asongan" ke mitra toko souvenir menunjukkan keberhasilan LINKSOS membangun rantai nilai lengkap (produksi-pemasaran-distribusi), mengatasi jebakan welfare dependency. Temuan ini memperkuat model partisipasi pemuda Bone et al. (2023) yang menekankan pendampingan berkelanjutan sebagai prasyarat kemandirian ekonomi komunitas marginal, dengan LINKSOS sebagai contoh empiris sukses replikasi model tersebut untuk difabel.

### **C. Kesehatan dan Pendidikan sebagai Pilar Inklusi Sistemik**

Integrasi Posyandu Disabilitas dan shuttle bus SLB mencerminkan paradigma sistemik Larasati dan Madalina yang mengadvokasi pendekatan multi-sektor dalam desa inklusi. Koordinator Posyandu yang menyatukan RSJ, SLB, dan PKK desa merepresentasikan triangulasi layanan yang selama ini terpisah-pisah. Narasi ibu tuna netra tentang "terapi rutin gratis" mengilustrasikan efektivitas OMS dalam mengisi gap layanan publik, sejalan dengan Febriantanto (2019) yang mengidentifikasi aksesibilitas sebagai hambatan utama partisipasi difabel.

### **D. Transformasi Sosial melalui Forum Komunitas**

Pembentukan forum hukum difabel dan Bulan Difabel bulanan mengubah dinamika sosial desa dari segregasi menuju interaksi organik, mengkonfirmasi Ortega (2023) bahwa partisipasi masyarakat dalam program komunitas menciptakan efek multiplier sosial. Kutipan warga RT tentang "ibu-ibu PKK ikut posyandu bareng" menunjukkan normalisasi interaksi sosial yang menjadi prasyarat inklusi sejati (Probosiwi, 2017). LINKSOS berhasil menggeser persepsi "kasihan" menjadi "warga berhak", menciptakan budaya desa yang menginternalisasi prinsip CRPD secara organik.

### **E. Model OMS Hybrid LINKSOS**

Sintesis temuan menghasilkan model OMS hybrid yang mengintegrasikan lima fungsi krusial: advokasi regulasi (Ra'is, 2017), pemberdayaan ekonomi (Bone et al., 2023), koordinasi layanan (Larasati & Madalina), fasilitasi partisipasi (Ortega, 2023), dan monitoring hukum (Febriantanto, 2019). Keunikan model ini terletak pada pendekatan "dari bawah ke atas" yang menjadikan difabel sebagai aktor aktif, bukan objek program. Narasi koordinator "DNA Bedali sudah berubah" mengkonfirmasi sustainability model OMS yang tertanam dalam struktur sosial desa, memberikan blueprint replikasi nasional sebagaimana direkomendasikan Kusumawiranti (2021).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS) berperan sebagai aktor inklusi sosial sistemik yang mengubah paradigma pemenuhan hak disabilitas di Desa Bedali dari pendekatan welfare menjadi rights-based approach melalui lima dimensi terintegrasi. Pertama, LINKSOS berhasil mentransformasi peran ekonomi difabel dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha mandiri melalui Omah Difabel yang membangun rantai nilai

lengkap dari produksi hingga pemasaran. Kedua, Posyandu Disabilitas menciptakan akses layanan kesehatan preventif yang mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang dan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor rumah sakit jiwa dengan PKK desa. Ketiga, program pendidikan inklusif dengan shuttle bus SLB dan tutor pendamping meningkatkan akses formal anak difabel yang sebelumnya terisolasi. Keempat, advokasi infrastruktur lingkungan menghasilkan ramp balai desa dan trotoar aksesibel yang mengubah mobilitas fisik warga difabel. Kelima, forum hukum difabel dengan paralegal PKK menjamin kesetaraan hukum melalui mediasi cepat kasus diskriminasi dan bullying.

Temuan utama menegaskan bahwa efektivitas OMS terletak pada model hybrid yang mengintegrasikan advokasi regulasi desa, pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, koordinasi layanan publik, fasilitasi partisipasi sosial, dan pendampingan hukum preventif. Transformasi budaya desa dari "orang kasihan" menjadi "warga berhak" terjadi melalui dialog musyawarah yang konsisten dan pendampingan berkelanjutan, menjadikan Desa Bedali sebagai model desa inklusi yang siap direplikasi nasional. Pola intervensi LINKSOS membuktikan bahwa OMS lokal mampu mengisi celah implementasi UU Disabilitas pada level mikro melalui triangulasi pemerintah desa-komunitas difabel-pihak ketiga.

Saran penelitian ini menyarankan pemerintah desa untuk mengadopsi Forum Hukum Difabel dan Bulan Difabel sebagai agenda rutin APBDes tetap, mengalokasikan anggaran infrastruktur aksesibilitas minimal 10% dari dana desa, dan membentuk unit koordinasi OMS permanen dalam struktur BPD. Bagi OMS lain, replikasi model Omah Difabel disarankan dengan tahap bertingkat: pelatihan produksi 6 bulan, pemasaran online 3 bulan, dan kemandirian pasar tahun kedua. Pemerintah kabupaten disarankan mengembangkan Unit Layanan Disabilitas kecamatan menjadi prototipe nasional berbasis kolaborasi OMS-publik, dengan monitoring tahunan efektivitas layanan. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan studi komparatif multi-desa untuk menguji generalisasi model LINKSOS, analisis biaya-manfaat Omah Difabel secara longitudinal, serta evaluasi dampak forum hukum difabel terhadap penurunan kasus diskriminasi dalam lima tahun ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbo C., Kinyanda E., Kizza R. B., Levin J., Ndyababangi S., Stein D. J. Prevalence, comorbidity and predictors of anxiety disorders in children and adolescents in rural north-eastern Uganda Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 2013;7(1):21 <https://doi.org/10.1186/1753-2000-7-21>
- Abu Hamad, B. Jones, N. Gercama, I. Adolescent access to health services in fragile and conflict-affected contexts: The case of the Gaza Strip Conflict and Health. 2021;15:40 <https://doi.org/10.1186/s13031-021-00379-0>
- Dintwa, K.F., Letamo, G.& Navaneetham, K., 2019, 'Measuring social vulnerability to natural hazards at the district level in Botswana', Jambá: Journal of Disaster Risk Studies 11(1), 1-11. <https://doi.org/10.4102/jamba.v11i1.447>

- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N.& Lim, W.M., 2021, 'How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines', *Journal of Business Research* 133, 285-296.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Eaton, J., Nwefoh, E., Duncan, J., Sangare, O., Weekes, Y.& Adams, B., 2022, 'Addressing mental health and well-being in the context of climate change: Examples of interventions to inform future practice', *Intervention* 20(1), 107.  
[https://doi.org/10.4103/intv.intv\\_35\\_21](https://doi.org/10.4103/intv.intv_35_21)
- Febriantanto, Pangky. 2019. Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*. Vol 1(1). Hlm 157-190
- Grasham, C.F., Calow, R., Casey, V., Charles, K.J., de Wit, S., Dyer, E. et al., 2021, 'Engaging with the politics of climate resilience towards clean water and sanitation for all', *Npj Clean Water* 4(1), 42.  
<https://doi.org/10.1038/s41545-021-00133-2>
- I. Gunawan et al., "Measuring the Effect of Midterm Exam on Final Exam of Online Learning during COVID-19 Pandemic: The Mediating Role of Assignments," 2022 8th International Conference on Education and Technology (ICET), Malang, Indonesia, 2022, pp. 14-19, doi: 10.1109/ICET56879.2022.9990739. keywords: {COVID-19;Pandemics;Databases;Education;Information systems;midterm exam;assignments;final exam;online learning and teaching;COVID-19 pandemic},
- Kusumawiranti, Retno, "Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa" *Populika*, Vol 9:1, 2021.  
<https://doi.org/10.37631/populika.v9i1.348>
- Larasati, Eufasia Nadia, dan Maria Madalina, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Penyelenggaraan Desa Inklusi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo", "SUNAN KALIJAGA
- Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS). (2025). Rangkuman kegiatan tahun 2025.  
<https://lingkarsosial.org/rangkuman-kegiatan-linksos-tahun-2025/>
- Mei Bone, Paulus Y, Marthen Patiung, dan Aplonia Pala, "Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan di Desa Nansean Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara", *JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5:1, 2023.
- Ortega, Lucky, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10:10, 2023.
- Probosiwi, Ratih, "Desa Inklusi sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41:3, 2017.
- Ra'is, Dekki Umamur, "Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa", *REFORMASI*, Vol. 7:2, 2017.
- Rofiah, S. K., Zuchdi, M. Z., Rieuwpassa, D. O., Paongan, L., Septiani, Y., Amelia, T., Harisman, A. S. M., Siska, Salsabila, D. T., Salamah, I. D., Sari, K., Angelina, S. T. D., Sari, W. W., Kristiana, W. P., & Gunawan, I. (2020).

Workshop and training on making personal protective equipment during the COVID-19 pandemic as a form of empowering persons with disabilities. Proceedings of the 1st International Conference on Information Technology and Education (ICITE 2020), 374–380.  
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201214.264>